ANALISIS KINERJA ANGGARAN PROGRAM RESTORASI GAMBUT PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN PROVINSI SUMATERA SELATAN PADA MASA PANDEMI

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan

Dalam Menempuh Derajat Sarjana S-1

Ilmu Administrasi Publik

Oleh :

Muhammad Daffa

NIM. 07011381823149

Konsentrasi Keuangan Negara dan Fiskal

JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
DESEMBER 2022

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Muhammad Daffa
NIM	: 07011381823149
Tempat dan Tanggal Lahir	: Palembang, 28 Juli 2000
Program Studi/Jurusan	: Ilmu Administrasi Publik
Judul Skripsi	:Analisis Kinerja Anggaran Program Restorasi Gambut Pada Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan Pada Masa Pandemi

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Seluruh data, informasi serta pernyataan dalam penambahan dan kesimpulan yang disajikan dalam karya ilmiah ini, kecuali yang disebutkan sumbernya adalah hasil pengamatan penelitian, pengelolaan serta pemikiran saya dan pengarahan dari pembimbing yang telah ditetapkan.
2. Karya ilmiah yang saya tulis ini adalah asli dan pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik baik di Universitas Sriwijaya maupun perguruan tinggi lainnya.

Demikianlah pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan apabila dikemudian hari ditemukan bukti ketidak-benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh melalui pengajuan karya ilmiah ini.

Palembang, Desember 2022

Yang membuat pernyataan,

Muhammad Daffa

07011381823149

i

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

ANALISIS KINERJA ANGGARAN PROGRAM RESTORASI GAMBUT PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN PROVINSI SUMATERA SELATAN PADA MASA PANDEMI

SKRIPSI

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana S-1

Ilmu Administrasi Publik

Oleh:

MUHAMMAD DAFFA
07011381823149

Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing,

Pembimbing I

Sofyan Effendi, S.IP., M.Si
NIP. 196911101994011001

Pembimbing II

Januar Eko Aryansah, S.IP., S.H., M.Si.
NIP. 198801272019031005

Mengetahui,
Ketua Jurusan

Dr. Muhammad Nur Budiyanto, S.Sos., MPA
NIP. 196911101994011001

HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

ANALISIS KINERJA ANGGARAN PROGRAM RESTORASI GAMBUT PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN PROVINSI SUMATERA SELATAN PADA MASA PANDEMI

Skripsi

Oleh :

MUHAMMAD DAFFA

07011381823149

Telah dipertahankan di depan penguji
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat
Pada tanggal 13 Desember 2022

Pembimbing :

Tanda Tangan

1. Sofyan Effendi, S.IP., M.Si
   NIP. 197705122003121003

2. Januar Eko Aryansah, S.IP., S.H., M.Si
   NIP. 198801272019031005

Penguji :

Tanda Tangan

1. Drs. Mardianto, M. Si
   NIP. 196211251989121001

2. Aulia Utami Putri, S. IP., M. Si
   NIP. 199508142019032020

Mengetahui,

Dekan FISIP UNSRI,

Prof. Dr. Alfitri, M.Si
NIP. 196601221990031004

Ketua Jurusan
Ilmu Administrasi Publik

Dr. H. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA
NIP. 196911101994011001

ABSTRACT

This research is entitled "Analysis of Peat Restoration Program Budget Performance at the South Sumatra Provincial Land and Environment Service During the Pandemic". This study uses the budget performance measurement method according to Mardiasmo, namely Value For Money, with an economic, efficiency and effectiveness approach. The type of research used is qualitative. Primary data in the form of Budget Realization Reports and Peat Restoration Program Performance Reports. The results of this study show that the economic level in 2019 is 77.20% and in 2020 it is 96.50% which is experiencing a decline in the economy. In the efficiency dimension in 2019 the efficiency value is 75.18%, which means the efficiency criteriu. Then in 2020 the efficiency value decreased by 91.49% with less efficient criteria. The effectiveness dimension of the Peat Restoration program at the South Sumatra Provincial Land and Environment Agency in 2019-2020 is effective with a percentage of 100%.

Keywords: Economic, Efficiency, Effectiveness

ADVISOR I	ADVISOR II
Sofyan Effendi, S.IP., M.Si	Januar Eko Aryansah, S.IP., S.H., M.Si
NIP.197705122003121003	NIP. 198801272019031005

Palembang, Desember 2022
Chairman of the Department of Public Administration
Fculty Social and Political Science
University Of Sriwijaya

Dr. Muhammad Nur Budiyanto,S.Sos., MPA
NIP. 196911101994010 01

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul "Analisis Kinerja Anggaran Program Restorasi Gambut pada Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan Pada Masa Pandemi". Penelitian ini menggunakan metode pengukuran kinerja anggaran menurut Mardiasmo yaitu *Value For Money,* dengan pendekatan ekonomi, efisiensi dan efektivitas. Jenis Penelitian yang digunakan yaitu Kualitatif. Data Primer yang berupa Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Kinerja Program Restorasi Gambut. Hasil Penelitian ini menunjukkan tingkat ekonomi ditahun 2019 yaitu 77.20% dan di 2020 sebesar 96.50% yang dimana mengalami penurunan di ekonomi. Pada dimensi efiiensi tahun 2019 nilai efisiensi sebesar 75.18% yang berarti kriteria efisiensi. Kemudian di tahun 2020 mengalami penurunan nilai efisiensi yaitu sebesar 91.49% dengan kriteria kurang efisien. Dimensi efektifitas terhadap program Restorasi Gambut pada Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan di tahun 2019-2020 yaitu efektif dengan persentase 100%.

Kata Kunci: Ekonomi, Efisiensi, Efektivitas

PEMBIMBING I	PEMBIMBING II
Sofyan Effendi, S.IP., M.Si	Januar Eko Aryansah, S.IP., S.H., M.Si
NIP.197705122003121003	NIP. 198801272019031005

Palembang, Desember 2022
Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sriwijaya

Dr. Muhammad Nur Budiyanto,S.Sos., MPA
NIP. 196911101994010 01

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Allah Swt. atas ridanya saya dapat menyelesaikan penyusunan penelitian ini. Adapun judul penelitian yang saya ajukan adalah "Analisis Kinerja Anggaran Program Restorasi Gambut pada Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan Pada Masa Pandemi"

Penelitian ini diajukan untuk memenuhi syarat kelulusan mata kuliah Skripsi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya. Tidak dapat disangkal bahwa butuh usaha yang keras dalam penyelesaian pengerjaan penelitian ini. Namun, karya ini tidak akan selesai tanpa orang-orang tercinta di sekeliling saya yang mendukung dan membantu. Terima kasih saya sampaikan kepada:

1. Allah SWT yang teah memberikan kemudahan dan kelancaran dalam proses penyusunan skripsi ini.
2. Keluarga, Terkhususnya Orang Tua Ayah dan Ibu yang senantiasa memberikan doa dan kasih sayang serta perhatian kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Prof.Dr. Alfitri, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
4. Dr Muhammad Nur Budiyanto, S.Sos., MPA. Selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik
5. Sofyan Effendi, S.IP., M.Si selaku Ketua Jurusan Hubungan Internasional Universitas Sriwijaya dan Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan bimbingan, menginspirasi dan mengajari selama proses penyusunan skripsi ini.
6. Januar Eko Aryansah, S.IP., SH., M.Si, selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Publik Universitas Sriwijaya dan Dosen pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, menginspirasi dan mengajari selama proses penyusunan skripsi ini.
7. Bapak Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan nasihat selama masa perkuliahan.
8. Ibu Rafflesia Adesty selaku Administrasi di Jurusan Ilmu Administrasi Publik yang sudah mendukung dan membimbing selama proses penyusunan skripsi ini.
9. Segenap Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah mendidik dan memberikan ilmu selama kuliah dan seluruh staf yang selalu sabar melayani segala administrasi selama proses penelitian ini.
10. Teman Teman seperjuangan yang Bernama Iqbal Muhammad Nur, Sandika Wibisena, Zaki Muhammad dan Muhammad Jalaluddin Akbar yang senantiasa memberi masukan dan saran yang membangun.
11. Mona Nur Adhillah selaku pacar yang setia menemani serta memberi masukan dan saran yang membangun

Palembang, Desember 2022

Muhammad Daffa

DAFTAR ISI

PERNYATAAN ORISINALITAS ..... *i*

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI ..... *ii*

HALAMAN PERSETUJUAN PENGUJI SKRIPSI ..... *iii*

ABSTRACT ..... *iv*

ABSTRAK ..... *v*

KATA PENGANTAR ..... *vi*

DAFTAR ISI ..... *vii*

DAFTAR TABEL ..... *ix*

DAFTAR GAMBAR ..... *x*

DAFTAR SINGKATAN ..... *xi*

DAFTAR LAMPIRAN ..... *xii*

BAB I PENDAHULUAN *1*

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 7

C. Tujuan Penelitian 7

D. Manfaat Penelitian 7

BAB II TINJAUAN PUSTAKA *8*

A. Landasan Teori 8

1. Konsep Keuangan Negara 8
2. Kinerja Anggaran 9
3. Teori Kinerja Anggaran 12

B. Penelitian Terdahulu 16

C. Kerangka Pemikiran 29

BAB III METODE PENELITIAN *30*

A. Jenis Penelitian 30

B. Definisi Konsep 30

C. Fokus Penelitian 32

D. Jenis dan Sumber Data 33
E. Informasi Penelitian 33
F. Teknik Pengumpulan Data 33
G. Teknik Analisis Data 34
H. Sistematika Penulisan 35

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....*37*

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 37
1. Sejarah Singkat Dinas Lingkungan Hidup & Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan 37
2. Letak Geografis Dinas Lingkungan Hidup & Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan 37
3. Visi dan Misi Dinas Lingkungan Hidup & Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan 38
4. Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup & Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan 39
5. Kedudukan, Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan 42

B. Kinerja Anggaran Program Restorasi Gambut Pada Dinas Lingkungan Hidup & Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan Pada Masa Pandemi 59
1. Analisis Ekonomi dengan aspek Realisasi Anggaran dan Target Anggaran program Restorasi Gambut di Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan 60
2. Analisis Efisiensi dengan aspek Realisasi Jumlah dan Target program Restorasi Gambut di Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan.....64
3. Analisis Efektivitas dengan aspek Realisasi KHG dan Target KHG Restorasi Gambut di Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan.....68

BAB V PENUTUP.....*73*

A. Kesimpulan 73
B. Saran 74

DAFTAR PUSTAKA.....*76*

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Luasan ekosistem gambut berdasarkan Wilayah Administrasi Kab/kota 3
Tabel 1. 2 Realisasi Anggaran Belanja Tahun 2019-2020.....5
Tabel 1.3 Jumlah Rencana Restorasi Gambut.....5
Tabel 2. 1 Rumus Ekonomi.....14
Tabel 2. 2 Rumus Efisiensi.....15
Tabel 2. 3 Penelitian Terdahulu.....16
Tabel 2. 3 Kerangka Pemikiran 29
Tabel 3. 1 Fokus Penelitian 32
Tabel 4.1 Kriteria ekonomi 61
Tabel 4.2 Perhitungan Ekonomi program Restorasi Gambut.....62
Tabel 4.3 Kriteria Pengukuran Efisiensi 64
Tabel 4.4 Jumlah Rencana Restorasi Gambut.....65
Tabel 4.5 Realisasi Anggaran Restorasi Gambut 66
Tabel 4.6 Pengukuran Efisiensi Restorasi Gambut 67
Tabel 4.7 Kriteria Pengukuran Efektivitas.....69
Tabel 4.8 Realisasi dan Target KHG Restorasi Gambut 70
Tabel 4.9 Matriks Hasil.....72

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Peta lokasi Dinas Lingkungan Hidup Dan Pertanahan (DLHP) Provinsi Sumatera Selatan 38
Gambar 4.2 Susunan Organisasi DLHP Provinsi Sumatera Selatan 40

DAFTAR SINGKATAN

APBN	: Anggaran Pemerintah dan Belanja Negara
BNPB	: Badan Nasional Penanggulangan Bencana
BRG	: Badan Restorasi Gambut
Covid-19	*: Pandemi Corona Virus Disease 2019*
DLHP	: Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan
KLHK	: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Lakip	: Laporan Kinerja
KHG	: Kesatuan Hidrologis Gambut
LRA	: Laporan Realisasi Anggaran
Rp	: Rupiah
TA	: Tahun Anggaran
TP	: Tugas Pembantu
UU	: Undang-Undang

DAFTAR LAMPIRAN

Pedoman Wawancara.....92
Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2019-2020.....94
Laporan Kinerja 2019-2020.....96

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebakaran hutan dan lahan pada 2015 menimbulkan bencana kabut asap dan menjadi sorotan dunia internasional. Tercatat lebih dari 2,61 juta hektar hutan dan lahan di Indonesia terbakar, 33 persen diantaranya merupakan lahan gambut atau seluas 869.754 hektar. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan *World Bank* menaksir kerugian akibat bencana kebakaran hutan dan lahan serta dampak kabut asap mencapai Rp221 triliun. Tidak hanya menghancurkan kekayaan hayati, kebakaran ini juga mengganggu perekonomian, pendidikan, mengancam kesehatan masyarakat, bahkan menelan korban jiwa. Kerugian ini belum memperhitungkan dampak kerugian jangka panjang dialami warga yang menghirup kabut asap akibat kebakaran.

Pemerintah Indonesia telah menunjukkan keinginan yang kuat untuk bertindak dalam memerangi kebakaran hutan dan gambut, sementara pada saat yang sama juga mempercepat proses pemulihan ekosistem gambut yang telah rusak. Komitmen tersebut telah diterjemahkan kedalam kebijakan, program dan pengaturan kelembagaan paska kebakaran besar pada tahun 2015. Pada 6 Januari 2016, melalui Peraturan Presiden 1/2016, Badan Restorasi Gambut Indonesia (Badan Restorasi Gambut/BRG) didirikan. Peraturan tersebut dengan jelas menyatakan bahwa BRG memiliki tanggung jawab untuk merencanakan dan memimpin kegiatan restorasi gambut pada 2 juta hektar lahan gambut dalam waktu 5 tahun. Daerah prioritas untuk restorasi adalah ekosistem gambut di 7 provinsi: Riau, Jambi, Sumatra Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan dan Papua.

Gambut sendiri didefinisikan sebagai tanah yang jenuh air dan tersusun dari bahan tanah organic berupa sisa-sisa tanaman dan jaringan tanaman yang melapuk dengan ketebalan lebih dari 50 cm (Noor dan Heyde 2007). Gambut merupakan suatu ekosistem lahan basah yang dicirikan oleh adanya akumulasi bahan organik dalam kurun waktu yang lama. Restorasi juga sangat penting untuk jangka masa depan karena Restorasi Gambut juga me-Revitalisasi mata pencaharian masyarakat. Sebagai contoh di Sumatera Selatan beberapa perkebunan sawit di lahan gambut daerah Ogan Komering Ilir telah dikembangkan sawit yang dipadukan dengan nanas. Perusahaan menanam sawitnya dan masyarakat yang bekerja di perusahaan tersebut dapat menanam nanas disela sela tanaman sawit. Selain itu Restorasi Gambut juga sangat penting untuk jangka Panjang karena Restorasi Gambut melakukan penghijauan lahan sehingga persentase kebakaran lahan menjadi berkurang.

Kebijakan pengelolaan lahan rawa di Provinsi Sumatera Selatan didasarkan atas konsep pembangunan sumber daya alam yang berkelanjutan. Dalam konteks ini, lahan rawa selain dipandang sebagai ekosistem yang perlu dilindungi, juga dapat dilihat sebagai potensi yang bisa dikembangkan dan dimanfaatkan dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip kelestariannya. Pengelolaan lahan gambut di Provinsi Sumatera Selatan juga ditujuka untuk mendukung upaya pencapaiian pembangunan, yaitu peningkatan produksi pangan padi yang memberikan kontribusi pada pemenuhan kebutuhan pangan nasional (Munandar,Yunardi, 2006).

Ekosistem gambut Sumatera Selatan tersebar di 7 kabupaten kota, namun hampir separuhnya berada pada wilayah administrasi Kabupaten Ogan Komering Ilir, dengan luasan yaitu 1,03 juta hektar atau 49,28 % dari total area ekosistem gambut Sumatera Selatan. Kabupaten lain yang memiliki ekosistem gambut yang luas adalah Kabupaten Banyuasin (0,563 juta hektar atau 26,92% total ekosistem gambut Sumatera

Selatan) dan Kabupaten Musi Banyuasin (0,359 juta hektar atau 17,16%). Luasan bentang lahan ekosistem gambut pada kabupaten kota di Sumatera Selatan disajikan pada tabel 1.1

Tabel 1.1 Luasan ekosistem gambut berdasarkan Wilayah Administrasi Kab/kota

NO	KAB/KOTA	LUAS (Ha)	%
1	Ogan Komering Iir	1.030.601	49,28
2	Banyu Asin	563.083	26,92
3	Musi Banyu Asin	358.938	17,16
4	Musi Rawas Utara	57.515	2,75
5	Muara Enim	35.894	1,72
6	Penukal Abab Lematang Ilir	30.305	1,45
7	Musi Rawas	15.104	0,72
Total (Ha)		**2.091.440**	**100,00**

Sumber : datagambut.sumselprov.go.id

Menurut dari Jurnal (Qodriyatun, 2019) Sumber Dana Anggaran untuk pelaksanaan kebijakan restorasi gambut berasal dari Anggaran Pemerintah dan Belanja Negara (APBN) dan dana dari kerja sama internasional. Untuk dana APBN, BRG masih menggunakan anggaran yang ada di KLHK untuk pelaksanaan kegiatan di tahun 2016 karena BRG belum berstatus sebagai pengguna anggaran sendiri sebagaimana diamanatkan Peraturan Presiden No. 1 Tahun 2016. Untuk sementara, alokasi anggaran yang diperuntukkan guna mendukung kegiatan BRG dititipkan pada program pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan di KLHK.

Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, tahun 2020 merupakan tahun extraordinary akibat adanya pandemi covid-19. Menurut Kementrian Keuangan dari jurnal (Putra, 2021) menyatakan bahwa Kondisi pandemi tersebut secara langsung mempengaruhi prospek pertumbuhan ekonomi global sehingga beberapa Lembaga

Internasional memprediksi ekonomi global mengalami resesi. Selain membawa masalah di bidang Kesehatan, Pademi Covid-19 juga berimplikasi sangat luas terhadap ekonomi termasuk di Indonesia. Bahkan, kondisi tersebut pada akhirnya memaksa Pemerintah untuk menerbitkan sejumlah Kebijakan untuk menangani Covid-19 sekaligus menyelamatkan perekonomian, antara lain melalui penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk menangani Pandemi Corona Virus Desease (Covid-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.

Menurut Jurnal Yudha Perdana Putri (2017) Meskipun dalam kondisi pandemi covid-19, dalam menjalankan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga, pelaksanaan evaluasi kinerja penganggaran di tahun 2020 tetap dilaksanakan.

Kinerja anggaran diukur dari penyerapan anggaran yang merupakan konsistensi antara perencanaan dan implementasi (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249 Tahun 2011). Semakin tinggi realisasi anggaran belanja menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi anggaran belanja menunjukkan semakin rendahnya kinerja. Kinerja anggaran dapat dilihat dari realisasi belanja anggaran selama satu tahun terhadap total anggaran setelah perubahan.

Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan (DLHP) Provinsi Sumatera Selatan selaku perantara menerima target anggaran APBN di tahun 2019 dan 2020 sebagaimana di tabel 1.1

Tabel 1. 2 Realisasi Anggaran Belanja Tahun 2019-2020

Tahun	Target	Realisasi	Penyerapan
2019	Rp.. 28.421.283.000	Rp. 21.942.524.515	77.20%
2020	Rp. 12.100.000.000	Rp. 11.676.343.004	96.50%

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Prov Sumatera Selatan

Berdasarkan tabel 1.2 dapat dilihat target dan realisasi anggaran Restorasi Gambut tahun 2019 – 2020. Pada tahun 2019 anggaran tidak mencapai target yang ditentukan yaitu Rp 28.421.283.000 dan hanya mampu mencapai realisasi sebesar Rp. 21.942.524.515 dengan persentase 77.20%. Sedangkan pada tahun 2020 Realisasi anggarannya sebesar Rp.11.676.343.004 dari target Rp.12.100.000.000 dengan persentase 96.50%, dapat dilihat anggaran dan realisasi dari program Restorasi Gambut, yang terdapat penurunan anggaran dari tahun 2019-2020.

Pada Program Restorasi Gambut, Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Prov. Sumatera Selatan memiliki peran sebagai Tugas Pembantu(TP) dalam menjalankan Program Restorasi Gambut itu sendiri. Salah satunya yaitu membangun Sekat Kanal dan sumur bor. Sumatera Selatan memiliki luas lahan gambut yaitu 2.091.440 hektar yang terdiri dari 36 KHG, KHG adalah ekosistem gambut yang terletak di antara dua sungai.

Tabel 1.3 Jumlah Rencana Restorasi Gambut

Tahun	Jumlah Rencana Restorasi Gambut	Jumlah Realisasi Restorasi Gambut	Persentase Realisasi Restorasi Gambut(%)
2019	484	432	89.25%
2020	410	432	105.36%

Sumber : Data diolah oleh penulis merujuk pada Laporan Kinerja TP Sumsel TA 2019-2020

Restorasi Gambut yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Prov. Sumatera Selatan ialah pembangunan sekat kanal dan sumur bor. Pada tahun 2019, Target pembangunan sekat kanal berjumlah 300 unit dari 7 KHG dan terealisasi berjumlah 224 unit dari 7 KHG, Sedangkan target pembangunan sumur bor berjumlah 260 unit dari 2 KHG dan terealisasi hanya 208 unit dari 2 KHG. Pada Tahun 2020, Dinas Lingkungan Hidup menargetkan pembangunan sekat kanal berjumlah 210 unit dari 7 KHG dan terealisasi melebihi target yaitu 224 unit dari 7 KHG, Pembangunan sumur bor yang ditargerkan Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan berjumlah 200 unit dari 7 KHG, Terealisasi nya juga melebihi target yaitu sebanyak 208 unit dari 1 KHG. Sehingga kalau digabungkan Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Prov. Sumatera Selatan melakukan Restorasi Gambut di Tahun 2019 berjumlah target/rencana 484 unit dari 7 KHG keseluruhan dan terealisasi 432 unit dari pembangunan sekat kanal dan sumur bor. Sedangkan di tahun 2020, ditargetkan/direncanakan 410 unit dari 7 KHG dan terealisasi sebesar 432 unit dari 7 KHG secara keseluruhan.

Berdasarkan tabel 1.3 dari data laporan kinerja TP Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Prov. Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2019-2020 menunjukkan bahwa ada penurunan jumlah rencana restorasi gambut dari tahun ke tahun. Merujuk pada hal tersebut dikatakan bahwa pada tahun 2019 rencana pembangunan sekat kanal dan sumur bor yaitu 484 dan di tahun 2020 yaitu 410. Untuk jumlah yang terealisasi di tahun 2019-2020 sama, yaitu 432.

Sehubungan dengan apa yang diuraikan diatas diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai Analisis Kinerja Anggaran program Restorasi Gambut di Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan dan mengetahui apa saja faktor faktor hambatan dalam . Maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul

"ANALISIS KINERJA ANGGARAN PROGRAM RESTORASI GAMBUT DI DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN (DLHP) PROVINSI SUMATERA SELATAN PADA SAAT MASA PANDEMI "

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang dapat diangkat dalam penelitian ini adalah "Bagaimana Kinerja Anggaran pada Program Restorasi Gambut di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan pada masa Pandemi ini"

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis Kinerja Anggaran Program Restorasi Gambut di Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan Pada saat masa Pandemi

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diharapkan dalam penelitian ini adalah :

a. Manfaat teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat berguna sebagai kajian yang bernilai guna untuk akademisi yang hendak melanjutkan penelitianni dalam studi – studi Ilmu Administrasi Publik, Khususnya konsentrasi Keuangan Negara

b. Manfaat Praktis

Diharapkan Penelitian ini, mampu memberikan masukan atau kritikan dan informasi bermanfaat bagi Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan tentang Kinerja Anggaran yang bersesuaian dengan prinsip *value for money,* agar penggunaan anggaran program restorasi gambut dapat berjalan lebih baik dan mampu mengoptimalkan penggunaan anggaran.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Atmadja, A. P. S. (1996). *Kapita Selekta Keuangan Negara*.

Dewi Erowati, S.Sos, Ms. (2019). Tata Kelola Keuangan Pemerintahan. In CV. Penerbit Qiara Media.

Gibson,J.L.2003. *Struktur Organisasi dan Manajemen*. Jakarta:Erlangga 5.

Indra Bastian. (2005). *Akuntansi Sektor Publik* (S. Saat & Y. Sumiharti (eds.)). Erlangga.

Mardiasmo.2009.*Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit Andi Offset.

M.Munandar. (2000). *Budgeting*. http://dx.doi.org/10.1016/j.appdev.2016.03.001%250A

Moeheriono. (2010). *Pengukuran kinerja berbasis kompetensi (competency based human resource management)*.

Noor, Y.R dan J.Heyde. 2007. *Pengelolaan Lahan Gambut Berbasis Masyarakat di Indonesia.* Proyek *Climate Change, Forest dan Peatlands in Indonesia.* Wetlands International-Indonesia Programme dan Wildlife Habitat Canada. Bogor

Robert N. Anthony, & Govindarajan, V. (2012). *Sistem Pengendalian Manajemen*. Salemba Empat.

Simamora, H. (1999). *Akuntansi Manajemen*

Jurnal

Ashari, M. I., & Kaukab, M. E. (2020). Analisis Kinerja Anggaran Berkonsep Value for Money. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi (JIMMBA)*, *2*(5), 728–740. https://doi.org/10.32639/jimmba.v2i5.669

Gare, M. E. (2017). Analisis Pengukuran Kinerja Dengan Menggunakan Value for Money. *Ekp*, *13*(3), 1576–1580.

Lia Hanifa. (2021). Analisis Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2016-2020. *Jurnal Ilmiah*, *8*(1), 71–84.

Periansya, P., Pratama, D., & Armaini, R. (2021). Analisis Kinerja Anggaran Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Dengan Pendekatan Konsep Value For Money. *I-Finance: A Research Journal on Islamic Finance*, *7*(1), 1–10. https://doi.org/10.19109/ifinance.v7i1.8419

Putra, Y. P. (2021). Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Kinerja Anggaran Aspek Implementasi Pada Satuan Kerja Lingkup BPKP RI: Analisis Perbandingan. *Jurnal Anggaran Dan Keuangan Negara Indonesia*, *3*(2), 93–112.

Qodriyatun, S. N. (2019). Kesiapan Pemerintah Daerah Provinsi Riau dan Sumatera Selatan dalam Pelaksanaan Kebijakan Restorasi Gambut. *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, *8*(2), 2017. http://jurnal.dpr.go.id/index.php/aspirasi/article/view/1260

Rahmah, R., Zuraida, Z., & Abdullah, S. (2017). Analisis Kinerja Anggaran Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen. *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, *3*(2), 213–222. https://doi.org/10.24815/jped.v3i2.8232

Ramadani, Rani Febria dan Lau, E. A. (2015). Analisis Kinerja Anggaran dan Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Samarinda tahun 2010-2014.

Journal of Chemical Information and Modeling, *53*(9), 1689–1699.

Sari, M. A. R. (2021). *Kinerja anggaran pada kegiatan perjalanan dinas di dinas ketenagakerjaan kota palembang tahun 2017-2019 skripsi*. *April*.

Wuwungan, G. T., Tinangon, J., & Rondonuwu, S. (2019). Penerapan Metode Value for Money Sebagai Tolok Ukur Penilaian Kinerja Keuangan Pada Organisasi Sektor Publik Di Dinas Kesehatan Kota Manado. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, *14*(4), 354–361. https://doi.org/10.32400/gc.14.4.26288.2019

Peraturan Perundang - Undangan

Kepmendagri No. 690.900.327. Tahun 1996, Tentang pedoman Penilaian Kinerja Keuangan.

Pasal 1 UU Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara RI, M. K. (2017). *Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 214 tahun 2017 mengenai Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Anggaran Kementerian Negara / Lembaga*. 1–43.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk menangani Pandemi Corona Virus Desease (Covid-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.

Peraturan Presiden 1/2016, Badan Restorasi Gambut Indonesia (Badan Restorasi Gambut/BRG) didirikan

RI, M. K. (2017). *Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 214 tahun 2017 mengenai Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Anggaran Kementerian Negara / Lembaga*. 1–43.